

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG SAPI DI DESA GURANTENG KECAMATA PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Lutfiah Amalia Sya'bani¹, Wawan Risnawan², Ahmad Juliarso³

Universitas Galuh^{1,2,3}

E-mail: lutfiah_amalia@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator yaitu: belum maksimalnya promosi baik di media offline maupun media online mengenai Wisata Kampung Sapi, belum adanya sarana dan prasarana khusus yang menunjang wisata edukasi Kampung Sapi, belum adanya kerja sama dengan pihak swasta, hal ini terlihat dari belum adanya MoU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 8 orang informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng yang diukur dengan tiga dimensi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terjadi hambatan yang ditemukan dalam peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng yaitu belum memadainya anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam memfasilitasi pengembangan wisata kampung sapi, kurang aktifnya promosi yang dilakukan karena minimnya kesadaran dan perhatian dari anggota POKDARWIS dll. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan wisatawan, menyediakan anggaran untuk anggota POKDARWIS sehingga dapat memotivasi untuk aktif mempromosikan wisata Kampung Sapi, dll.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pengembangan, Objek Wisata

PENDAHULUAN

Saat ini paradigma pariwisata. Perekonomian negara pembangunan berorientasi kepada dipengaruhi oleh pertumbuhan industri pengembangan sektor jasa dan industri. pariwisata, baik secara langsung Sektor industri terbesar yang maupun tidak langsung. Kontribusi memberikan keuntungan devisa bagi langsung pariwisata terhadap bangsa dari sektor non migas adalah pertumbuhan ekonomi berasal dari

pajak penghasilan yang dikenakan dari pelaku bisnis pariwisata, sedangkan kontribusi tidak langsung berasal dari pajak dan bea cukai yang dikenakan pada barang impor serta pajak yang dikenakan pada pengunjung.

Pembangunan dalam pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang perlu dikembangkan, hal ini sesuai pernyataan *development tool, generating economic growth, diversifying the economy, contributing to poverty alleviation and also, creating backward and forward linkages to other production and service sectors*. (Iain T. Christie and D. Elizabeth Crompton , 2003: 63). Pariwisata bisa menjadi alat pengembangan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai potensi wisata yang dapat digali serta dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, rekreasi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata.

Realisasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom dengan adanya pembangunan Pariwisata. Pemerintah desa sekarang memiliki kesempatan untuk mengelola, mengendalikan, dan mengatur sebagian besar kebutuhan serta kepentingan

masyarakatnya berkat implementasi dari otonomi desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari penjelasan diatas, pengelolaan potensi wisata merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan desa yang akan menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Dalam pengembangan destinasi wisata ini perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah desa sebaiknya memaksimalkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan wisata baik itu secara fisik maupun non fisiknya sehingga menjadi objek wisata unggulan serta dapat menarik para wisatawan untuk datang ke objek wisata.

Dengan adanya objek wisata, maka hal itu dapat membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menawarkan jasa dan menjual barang-barang yang terbuat dari banyak potensi desa.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas berdasarkan peninjauan awal penelitian dilakukan di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya ditemukan beberapa masalah mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya promosi baik di media offline maupun media online mengenai Wisata Kampung Sapi .
2. Belum adanya sarana dan prasarana khusus yang menunjang wisata edukasi Kampung Sapi.
3. Belum adanya kerja sama dengan pihak swasta, hal ini terlihat dari belum adanya MoU.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?

KAJIAN PUSTAKA

1. Peran Pemerintah Desa

Rivai (2006:148) mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Soerjono Soekanto (2012:243) menyatakan bahwa “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”

Menurut Soekanto (2012:243), peran mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran mengacu pada seperangkat aturan yang mengarahkan
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Setiap manusia niscaya memainkan berbagai peran yang dihasilkan dari pola-pola sosial dalam kehidupannya. Ini juga berarti mendefinisikan bahwa peran dapat mengatur individu dan dapat menentukan kontribusi apa yang mereka berikan kepada masyarakat dan peluang yang mereka hadapi.

Pitana dan Gayatri dalam (Pitana dan Gayatri, 2014: 95), mengemukakan pemerintah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai :

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata peran pemerintah desa sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Pemerintah, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar

- perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Sebagai fasilitator pemerintah melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
 - c. Dinamisator, dalam pilar good governance agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

2. Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah tourism dalam bahasa Inggris.

World Tourism Organizations (WTO) mendefinisikan pariwisata

adalah berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain (Muljadi, 2009).

Menurut Prof. Hunzieker dan Prof. K. Krapf dalam Muhammad Ilyas (2009), pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

Berbeda dengan A.J. Burkart dan S. Medlik dalam Muhammad Ilyas (2009), pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut.

Menurut Prof. Salah Wahab dalam Oka A Yoeti (2008), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

3. Pengembangan Pariwisata

Menurut Paturusi (2001), pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi Pemerintah. Pengembangan menurut J.S Badudu (1994) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah hal, cara atau hasil kerja mengembangkan.

Selanjutnya George (2019) sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata, untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya, tiga prinsip utama dalam pengembangan pariwisata adalah :

(1) *Ecological sustainability*, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada;

(2) *Social and cultural sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut,

(3) *Economic sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi

dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan dimasa mendatang.

4. Objek wisata

Objek dan daya tarik wisata menurut Marpaung (2002) adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.

Objek dan daya tarik wisata dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda atau objek peninggalan sejarah (heritage) dan seni budaya yang masih tetap hidup (living culture). Objek wisata budaya dapat berupa bangunan dengan arsitek khas atau peninggalan heritage sedangkan seni dan budaya berupa kesenian, sikap perilaku masyarakat atau adat istiadat (Fandeli, 2002).

Menurut Peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 1996 Objek wisata adalah sasaran wisata yang memiliki unsur fisik dominan, yang menarik untuk dikunjungi, ini berbeda dengan daya tarik wisata yang merupakan sasaran wisata yang memiliki unsur abstrak dominan, yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Suwantoro (2004) menjelaskan obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan :

1. Obyek wisata dan daya tarik wisata alam Obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.

2. Obyek wisata dan daya tarik budaya Obyek dan daya tarik bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan budaya.
3. Obyek wisata dan daya tarik pada minat khusus Obyek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus wisatawan itu sendiri, misalnya olah raga, memancing dan lain-lain.

Wisata Kampung Sapi di desa Guranteng, dalam hal ini peneliti menggunakan teori peran Pemerintah Desa dalam pengembangan pariwisata yang terdiri dari beberapa komponen yang di kemukakan oleh Pitana Dan Gayatri 2014. Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya yaitu:

1. Motivator
2. Fasilitator
3. Dinamisator

A. Motivator

Peran Pemerintah sebagai Motivator dalam pengembangan pariwisata diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan, Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mempunyai legitimasi atau kedudukan yang dimana pada posisi statusnya mempunyai kekuasaan sehingga sangat berperan besar dalam memberikan motivator kepada pihak-pihak sektoral yang akan mendukung kegiatan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah kekuasaannya (Pitana dan Gayatri 2014:95).

Dalam pengelolaan pariwisata, peran pemerintah desa sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk bergerak mengelola dan mengembangkan potensi wisata Kampung Sapi sebagai objek wisata yang berada di Desa Guranteng. Motivasi dirasa perlu karena masyarakat harus didorong supaya lebih mengerti kemana arah pembangunan dan pengelolaan objek wisata alam tersebut. diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang yaitu Kepala Desa Guranteng, Sekretaris Desa Guranteng, Ketua Organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARIWIS), serta 5 orang pengelola wisata Kampung Sapi. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun batasan penelitian dalam penelitian ini ialah tentang bagaimana peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng yang terdiri dari indikator yang telah ditentukan. Penelitian ini mengkaji tentang peran Pemerintah Desa dalam pengembangan

Dalam penelitian dimensi motivator terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi, yaitu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengembangan Wisata Kampung Sapi dan Pemerintah desa melakukan pembinaan terhadap POKDARWIS dan masyarakat mengenai pengembangan Wisata Kampung Sapi.

1. Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengembangan Wisata Kampung Sapi

Pemerintah desa memberikan sosialisasi tentang pariwisata dengan tujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang cara mengembangkan potensi wisata dan memacu masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan Wisata. Selain itu pemerintah desa mensosialisasikan bahwa objek wisata merupakan *icon* yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa demi kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi dalam pengembangan wisata Kampung Sapi yang dilakukan pemerintah desa Guranteng sudah optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah mengajak masyarakat untuk berkumpul bersama membahas hal-hal yang menunjang keberhasilan dalam pengembangan wisata kampung sapi serta mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam pengembangan wisata. Dalam

pelaksanaannya pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk ngopi bareng atau makan bersama dengan masyarakat sehingga pembawaan dari sosialisasi tersebut tidak kaku dan lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian pemerintah Desa Guranteng menciptakan program “Gerimis bagus” sebagai upaya mensosialisasikan potensi dari Kampung Sapi serta sebagai program pencegahan stunting bagi anak usia sekolah dasar yang dilakukan setiap sebulan sekali bergilir ke tiap tiap sekolah dasar yang ada di Desa Guranteng.

2. Pemerintah desa melakukan pembinaan terhadap POKDARWIS dan masyarakat mengenai pengembangan Wisata Kampung Sapi.

Aktifitas pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan POKDARWIS dan masyarakat terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan serta meningkatkan peran aktif dalam sadar wisata dan sapta pesona. Pembinaan dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti melakukan pertemuan dan diskusi tentang kondisi dan situasi objek wisata, memberikan pelatihan dan lokakarya (*workshop*) melalui penyajian materi terkait pengembangan objek wisata, dan memberikan pendampingan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam

menjaga, menata, dan mengelola objek wisata

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan dalam pengembangan wisata Kampung Sapi yang dilakukan pemerintah desa Guranteng sudah optimal. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa sudah mengadakan pembinaan dengan melakukan Kerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melakukan penyuluhan serta pelatihan kepada masyarakat pengelola wisata kampung sapi dan anggota POKDARWIS yang dilakukan seperenam bulan sekali atau setidaknya satu tahun sekali pasti dilakukan.

Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan pembinaan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan atau rapat bersama masyarakat yang dilaksanakan satu bulan sekali serta melakukan studi banding ke wisata sapi yang sudah maju untuk mengamati dan diaplikasikan di wisata kampung sapi Guranteng.

Dengan demikian uraian diatas sejalan dengan pendapat Thoha (2010:52)

Sebagai motivator, pemimpin merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan yang mengarah kepada upaya mendorong karyawan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang mampu memberikan sumbangan terhadap

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

Dengan demikian, berdasarkan teori diatas bahwa peran pemerintah desa Guranteng sebagai motivator dalam pengembangan wisata Kampung Sapi sudah berjalan dengan optimal. Pemerintah desa guranteng sudah melakukan perannya sebagai pendorong, penggerak dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penompang perekonomian.

2. Fasilitator

Peran Fasilitator merupakan peran Pemerintah sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya serta dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya, peran ini sendiri dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan (Pitana dan Gayatri 2005:95).

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan objek melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata. Pemerintah berupaya untuk memfasilitasi penunjang sarana dan prasarana, selain itu juga memfasilitasi promosi obyek wisata,

sampai dengan pemeliharaan objek wisata atau destinasi wisata.

Dalam penelitian dimensi fasilitator terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi, yaitu Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana wisata kampung sapi dan Pemerintah desa melakukan promosi wisata kampung sapi melalui media cetak maupun media online.

1. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana wisata kampung sapi

Sarana dan prasarana pariwisata adalah unsur-unsur yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata. Pengembangan pariwisata tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung suatu daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana dalam suatu objek wisata sangat diperlukan untuk menarik para wisatawan mengunjungi objek wisata tersebut. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang disediakan di suatu objek wisata akan membuat wisatawan nyaman dan betah menikmati objek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam pengembangan wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng belum optimal. Belum lengkapnya sarana dan prasarana seperti tempat edukasi, tempat cuci tangan, serta akses jalan yang belum bagus menjadi hambatan dalam pengembangan wisata Kampung Sapi. Hal ini diakibatkan karena terbatasnya alokasi anggaran untuk

pengembangan wisata kampung sapi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi hambatan ini yaitu dengan pengajuan proposal kerjasama dengan investor untuk penambahan anggaran dalam pembangunan sarana dan prasarana, sehingga pengembangan wisata Kampung Sapi dapat berjalan dengan optimal.

2. Pemerintah desa melakukan promosi wisata kampung sapi melalui media cetak maupun media online.

Promosi pariwisata merupakan salah satu kunci penting keberhasilan terhadap upaya peningkatan jumlah pengunjung suatu daerah tujuan wisata, sehingga dapat mendorong berkembangnya pariwisata tersebut. Kegiatan promosi idealnya dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa media yang dianggap efektif dapat menjangkau pasar baik secara online maupun offline.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan promosi untuk memasarkan potensi wisata dalam pengembangan wisata Kampung Sapi yang dilakukan pemerintah desa Guranteng belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurang aktifnya dan kurang kesadarannya anggota POKDARWIS yang mengelola promosi baik di media online maupun offline. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan dan menyediakan alokasi anggaran untuk anggota POKDARWIS sehingga dapat memotivasi mereka untuk aktif

melakukan promosi baik di media online maupun di media offline.

Uraian di atas tidak sesuai dengan pendapat Suharto (2014:98) bahwa : “Fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional, dengan menggunakan strategi strategi khusus untuk mencapai tujuan”.

Peran fasilitator senantiasa menjadikan sesuatu hal semakin mudah dengan cara menggunakan serangkaian teknik dan metode untuk mendorong masyarakat memberikan yang terbaik untuk mencapai hasil, oleh sebab itu peranan yang dimainkan fasilitator diharapkan sesuai dengan peran yang dimainkannya dan memiliki kebermanfaatannya bagi masyarakat. Kemudian Sebagai fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata, peran dari pemerintah desa adalah menyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas fisik maupun non fisik.

Dengan demikian pemerintah desa Guranteng sebagai fasilitator belum optimal dalam memberikan bantuan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan dengan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam prosesnya sehingga program pengembangan objek wisata belum berjalan dengan baik.

3. Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah memobilisasi sumber daya dalam pembangunan yaitu dengan mengerakan partisipasi multipihak. Pemerintah dalam hal ini mampu mengatur pola hubungan antara

pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam proses pengembangan pariwisata, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah harus dilakukan secara terencana serta pemberian bimbingan dan pengarahan harus dilakukan dengan intensif dan efektif. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu seperti dari Organisasi pemerintah seperti Dinas Pariwisata untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam pengembangan wisata. Selain itu, keikutsertaan pihak swasta bekerjasama dalam pengembangan pariwisata merupakan hal penting karena sebagai penunjang dalam kegiatan pariwisata.

Dalam penelitian dimensi dinamisator terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi, yaitu adanya kerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan wisata kampung sapi dan adanya kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata kampung sapi.

1. Adanya kerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan wisata kampung sapi.

Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan wisata sangat dibutuhkan. Pihak swasta mampu menyediakan keuangan yang akan membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan sektor pariwisata. Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan sektor swasta haruslah bersifat *mutual benefit* alias hubungan saling menguntungkan

yang diikat kontrak untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan wisata Kampung Sapi yang dilakukan pemerintah desa Guranteng belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pengusaha ataupun investor yang siap bekerjasama dengan pemerintah desa Guranteng untuk menunjang pengembangan wisata Kampung Sapi menjadi hambatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pembuatan proposal pengajuan kerjasama dengan pihak swasta untuk bantuan pembiayaan anggaran dalam pengembangan wisata Kampung Sapi.

2. Adanya kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata kampung sapi.

Sebagai dinamisor, pemerintah mampu bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya bekerja sama dengan organisasi pemerintah seperti Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata secara optimal. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu aspek penentu keberhasilan pengembangan pariwisata melalui pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata Kampung

Sapi yang dilakukan pemerintah desa Guranteng sudah berjalan namun belum optimal. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya yaitu belum dimilikinya agenda rutin, kurang tersedianya waktu yang cukup serta kurang kesediaan untuk melakukan pertemuan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu upaya menyusun agenda untuk melakukan pertemuan, melakukan pendekatan dengan Dinas Pariwisata, serta meminta kesediaan untuk melakukan pertemuan.

Uraian diatas tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Adhawati (2012:9) :

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu; Pemerintah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat.

Sebagai dinamisor, pemerintah desa belum mampu memobilisasi sumber daya dalam pembangunan yaitu dengan menggerakkan partisipasi multipihak untuk keberlangsungan pengembangan Pariwisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Peran pemerintah desa dalam

pengembangan wisata Kampung Sapi Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan namun belum optimal sesuai dengan peran pemerintah dalam pengembangan wisata menurut Pitana dan Gayatri (2014:95) yaitu peran pemerintah sebagai motivator, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran pemerintah sebagai dinamisator. Hal ini terbukti dari 6 indikator yang diteliti 2 diantaranya sudah terpenuhi, namun 4 indikator lainnya belum terpenuhi.

Adapun hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng berupa belum memadainya anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam memfasilitasi pengembangan wisata kampung sapi, kurang aktifnya promosi yang dilakukan karena minimnya kesadaran dan perhatian dari anggota POKDARWIS, belum adanya investor yang mau diajak kerjasama untuk pengadaan anggaran dalam pengembangan wisata Kampung Sapi, serta belum dimilikinya agenda secara rutin, kurang tersedianya waktu yang cukup dan kurang kesediaan Dinas Pariwisata untuk melakukan pertemuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang

dihadapi pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan wisatawan dengan pengajuan proposal kerjasama dengan berbagai pihak untuk penambahan anggaran dalam pembangunan, menyediakan anggaran untuk anggota POKDARWIS sehingga dapat memotivasi untuk aktif mempromosikan wisata Kampung Sapi, pembuatan proposal pengajuan kerjasama dengan swasta, dan penyusunan agenda pertemuan, pendekatan dan komunikasi dan meminta kesediaan Dinas Pariwisata untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan wisata Kampung Sapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Fandeli, Chafid. (1999). *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataa Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Marpaung, H dan Bahar, Herman .(2002). *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabet
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. (2014). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Rivai, Veithzal. (2006). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

- Sammeng, A.M. (2001). *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pwersada.
- Yoeti, Oka A, (2001). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Adhawati. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Manongki Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makasar: Unismuh Makassar.
- Thoha, M. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen suatu pendekatan prilaku, cetakan kesembilan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sumber lainnya**
- Ilyas, Muhammad. (2009). *Strategi Pengembangan Pariwisata Kepulauan Togeang di Kabupaten Tojo Una-Una*. Makassar. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Adhawati. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Manongki Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makasar: Unismuh Makassar.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 1996.